www.balairungpress.com

Kolom Pakar:
Utopianisme Pasar Modern
Oleh: M. Dawam Rahardjo (H. 42)

Insan Wawasan:
Melindung Pasar Rakyat Melalui Regulasi
(H. 40)

Balairung

Edisi 47/XXVII/MEI 2013

Pasar Rakyat dalam Gempuran Zaman

OPEN NOW! Monday to Friday at 9.30 am till 6pm

Taste the coffee

and enjoy the view of Yogyakarta

8th floor Pertamina Tower FEB UGM

@enakbanget_EB

Facebook fan page: Enak Banget_EB

Majalah Balairung Membaca Zaman

Oleh: M. Misbahul Ulum

Pada kepengurusan tahun lalu, dua produk Balairung, Balkon dan Jurnal hilang dari peredaran. Balkon ditiadakan. Sementara Jurnal ditangguhkan. Demi mengisi kekosongan, lahirlah (kembali) Majalah Balairung. Berbeda dengan Majalah pada masa sebelum penerbitan Jurnal[1], majalah Balairung tahun kemarin hadir sebagai manifestasi pers wacana. Ia berusaha mendedah suatu tema secara integral sesuai dalil *Integrated System of Journalism* (ISoJ). Meskipun pada akhirnya compang-camping di sana-sini.

Tak heran bila Forum Musyawarah Besar pada Desember 2012 lalu memutuskan Jurnal Balairung harus diadakan kembali. Pembacaan sepanjang tahun 2012 tidak dapat membantah bahwa Jurnal masih relevan dengan zaman. Demikian juga Balkon. Ia wajib diadakan kembali sebagai tali perekat komunitas dengan *civitas academica* UGM yang tahun kemarin sempat diemban www.balairungpress.com (Balpress) sendirian saja. Sedangkan Balpress dikembalikan ke wujud asalinya sebagai pers komunitas online.

Terkahir, Majalah Balairung yang ada di hadapan Anda. Berbeda dengan Majalah yang terbit pra-reformasi, kali ini ia hadir sebagai manifestasi pers Komunitas Jogja. Ia menjadi buah keterlibatan mahasiswa terhadap realitas dan permasalahan sosial di sekitarnya. Harapannya, ia mampu meruntuhkan menara gading yang memisahkan *civitas academica* dengan persoalan sosial yang melingkupinya.

Barangkali akan timbul pertanyaan, lantas apa bedanya dengan media *mainstream*? Bukankah tugas sebagai kontrol sosial sekaligus politik telah diritualkan dengan setia oleh mereka pasca reformasi? Tunggu dulu, belum tentu.

Bila sebelum era reformasi, media mainstream ketakutan dengan rezim negara, maka sekarang ia menyerah pada pasar, minimal terkooptasi olehnya. Ahmad Sobary[2] pernah meramalkan bahwa semakin mapan kapitalisasi, akan lebih leluasa pula kelak adanya kesempatan pengusaha menjadi penguasa. Sebelum itu, B.M Diah[3] juga hadir dengan ramalannya. Ia mengatakan bahwa di masa mendatang, yang ditakuti oleh Indonesia bukanlah pemerintahan. Melainkan adanya konsentrasi kepemilikan media pers yang menimbulkan monopoli opini dalam masyarakat. Tak ayal, penguasa sekaligus pengusaha dan pengusaha *cum* penguasa, dari lokal hingga nasional, acapkali menunggangi media untuk kepentingannya. Akhirnya, fakta yang dihadirkan pun tunduk pada selera mereka.

Pembacaan tersebut menjadi patok posisi Balairung. Kehadiran kembali Majalah Balairung diharapkan mampu menjadi bacaan alternatif, baik dari segi tema (persoalan) yang diangkat maupun cara mendedahnya. Sebab, pers mahasiswa dengan anak muda sebagai punggawanya barangtentu lebih independen dibandingkan dengan wartawan pada umumnya. Mereka tidak perlu tunduk pada pemodal, yang memang tidak ada, apalagi pasar. Ditambah dengan metoda-metoda keilmuan yang didapat di bangku kuliah, para pegiat akan menjadi, meminjam istilah Indi Ainullah, wartawan dan/atau ilmuwan[4]. Atau, meminjam bahasa yang lebih tegas dari Eka Suryana Putra[5], "Kita sudah harus mengatakan dengan lantang dan penuh kesadaran bahwa kita adalah pers dan juga mahasiswa pada saat bersamaan."

Dengan Majalah ini, para awak pun dituntut belajar membaca fenomena yang lebih luas dan tuntas. Sebab, fenomena yang didedah menjangkau lingkup yang lebih luas: masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Buah dari pmbacaan itu akan dituangkan dalam bentuk tulisan yang menjadi kristalisasi pembacaan sekaligus idealismenya. Dengan begitu, Nafas Intelektualitas Mahasiswa akan terus berhembus sekaligus menghidupi dan dihidupi oleh ruang-ruang sosial di sekitarnya.

Segala bentuk perubahan yang seolah tiada pernah berhenti ini tidak lain dari sebuah dinamika yang ada dalam diri Balairung. Para pegiatnya setia berefleksi agar segala aktivitas tak berakhir sebagai ritual tanpa makna belaka. Kritik di sana-sini kami terima sebagai konsekuensi logis dari perjalanan mendekati kesadaran eksistensial yang manusiawi.

Ilustrasi: Eka/BALAIRUNG

(Endnotes)

1. Majalah Balairung pada masa sebelum reposisi tahun 2000 lebih banyak bergulat dengan isu isu di tingkat nasional. Majalah Balairung kala itu(Ia) hadir sebagai pembacaan alternatif terhadap realitas keindonesiaan yang tak tersuarakan oleh media mainstream karena rezim otoritarian Orde Baru yang represif.
2. Baca Ahmad Sobary, "Penguasa dan Pengusaha," dalam Di Bawah Payung Agung: Kegetiran Berdialog dengan Kekuasaan, 1996. Yogyakarta: Penerbit Mizan. Hal 61.
3. Kurniawan Junaedhi. 1991. Ensiklopedia Pers Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 136.
4. Baca Indi Ainullah, "Wartawan dan/atau Ilmuwan: Sebuah Jurnal & Komunitas Intelektual," dalam Dapur Jurnal Balairung edisi 38/XIX/2005. Hal 159.
5. Baca Eka Suryana Putra, "Menyambangi Tanah Tak Bertuan," dalam Dapur Jurnal Balairung edisi 43/XXIII/2010. Hal 193.

DAFTAR ISI

Cover Story

Riuhnya aktivitas di Pasar Legi Kota Gede Yogyakartatidak hanya terjadi dalam bangunan. Pun pada area di luar bangunan, beberapa pedagang menggelar dagangannya. Dari jajanan pasar, sayur mayur, buah-buahan, beras, hingga telur, tersedia dilapak-lapak tepi jalan.Keberadaan pedagang ini memudahkan pembeli menemukan barang yang dibutuhkan.

MASTHEAD

Pembina
Dr. Kusridho Ambardi, M. A

Pemimpin Umum
M. Misbahul Ulum

Koordinator Majalah
Nindias Nur Khalika

Tim Kreatif
Dyah Arwinka, Humam Fauzi, Linggar Arum Sarasati, Mira Tri Rahayu

Pemimpin Redaksi
Ibnu Hajjar al-Asqolani

Editor
Dewi Kharisma Michellia, Hanindya Naafiani, Hesa Adrian Kaswanda, Ibnu Hajjar, Linna Permatasari, Mochammad Luthfi Ardiyanto, Purnama Ayu Rizky, Ratih Wilda Oktafiana, Sonia Fatmarani

Penulis
Agung Hidayat, Ahmad Syarifudin, Danny Izza, Desy Widya, Dian Puspita, Dimas Yulian, Faizal Akbar, Fikri Fawaid, Hamzah Zhafiri Dicky, Khairul Arifin, Khalimatu Nisa, M. Ageng Yudhapratama R. Marisa Kuncaraning Probo, Mega Fitriyani, Muhammad Faisol Amir, Nindias Nur Kalika, Rahardiana Muslichah, Reksa Pasha, Shianne Anita Syarif, Unggul Wicaksono, Yuliana Ratnasari

Kepala Riset
Muhammad Nafi'

Editor
Beniardi Nurdiansyah,Dhatu Wicaksono, Erinna Puspitasari, Luqman Zaqiy Jatibenang,Muhammad Nafi', Nur Rosyid

Penulis
Ach Fikri Syahrul Mubarok, Anisa Lailatul Fitria, Aziz R. Pratama, Dias Prasongko, Hesty Puji Rahayu, Wina Tryanita Sari Simanjuntak

Pemimpin Perusahaan
Yolanda Fajar N.

Staf Perusahaan
Atsnan Aufa, Dyah Arwinka S. W., Feby Septya, Herman Siswanto, Ummi Khaltsum, Wiwit Endri N., Yolanda Fajar N.

Kepala Produksi dan Artistik
Hary Prasojo Syafa'tillah

Redaktur Artistik
Eka Apriliawan, Regi Yanuar Widhia Dinnata, Tommy Gustaviano Yeza

Fotografer
Anugraheni Tri Hapsari, Hary Prasojo Syafa'tillah, Nawang Wulan, Nurrokhman, Sinaga Tresia Yesika, Regi Yanuar Widhia Dinnata

Ilustrator
Benyamin Siburian, Eka Apriliawan, Elvia Elfaretta, , Lukas Alfario, Muhammad Nabil, Tara Arani Faza

Layouter
Humam Fauzi, , Iftina Rasyinda Iksanti, Rindiawan Uji Purbowo, Muhammad Syafiq Luthfin Nur, Umar Hanif Al-Faruqy

Alamat Redaksi, Sirkulasi, Iklan dan Promosi:
Bulaksumur B-21 Yogyakarta 55281
Website: www.balairunpress.com
E-mail: Balairungpress@gmail.com
Kontak
Dyah Arwinka (085729990828)

Tergilas Mimpi Modernitas

Oleh: Ibnu Hajar Al Atsqolani

Pelabuhan-pelabuhan di Eropa jadi saksi. Waktu itu, di penghujung abad 16, hingga abad 18, ribuan penderita lepra dibawa berlayar. Bersama para gelandangan dan orang gila yang sehari-hari berkeliaran telanjang di jalan-jalan kota, mereka diberangkatkan. Bukan menuju ke daratan manapun yang lebih baik. Mereka, orang-orang "hina" itu, dibuang ke laut lepas untuk tak pernah kembali. Mereka memang bukan penjahat. Bukan pula pengidap virus menular yang membahayakan umat manusia. Persoalannya, peradaban yang ada tak punya ruang buat mereka. Orang-orang itu dianggap hanya mengotori wajah zaman modern yang sedang bersolek. Maka, mereka layak disingkirkan, enyah dari hingar bingar taman firdaus yang sedang dibangun di muka bumi.

Kebiadaban itu dicatat dengan cermat oleh Michel Foucault. Ia menguak satu dari sekian halaman sejarah peradaban umat manusia. Sekaligus memberi catatan: pada suatu masa, penyakit jiwa, kebodohan dan irrasionalitas pernah diamini sebagai kesemestian. Sebuah potret buram yang ia sebut—serta menjadi judul bukunya—"Kegilaan dan Peradaban".[1]

Bisa saja, "Kegilaan dan Peradaban" hanya sepenggal kisah dalam sejarah. Tapi realitas itu mempunyai relevansi positif dengan masa kini. Toh, esensi dari pemusnahan orang-orang lepra dan para gelandangan saat itu adalah sebuah ritual pengasingan. Saat ini pun kita masih bisa menyaksikan bagaimana roda modernisasi menggilas segala yang (dianggap) menghalanginya.

Lantas, apa hubungan antara modernisasi dengan pemusnahan pengidap lepra, gelandangan dan orang-orang gila? Kita bisa berangkat dari apa yang diistilahkan Edward Shills sebagai "kehendak untuk menjadi modern".[2] Dalam pelaksanaan kehendak ini, setidaknya ada empat aspek kelembagaan yang berperan: kapitalisme, industrialisme, kekuatan militer, serta kontrol terhadap informasi dan aktivitas sosial.[3]

Dua aspek yang pertama disebut merupakan fondasi yang saling memperkuat satu sama lain. Kapitalisme dan industrialisme berjalan dalam proses modernisasi yang terus melebarkan sayapnya. Kita bisa menandai perjalanan itu dari meletusnya revolusi industri. Ketika teknologi untuk keperluan produksi ditemukan, maka aktivitas industri kian melaju pesat. Komoditas diproduksi secara massif. Aktivitas produksi tidak lagi

dijalankan untuk memenuhi kebutuhan. Sebaliknya, kebutuhanlah yang terus diciptakan untuk menampung hasil produksi.[4]

Perluasan pun dilakukan. Negara-negara yang menguasai sektor produksi mencari daratan baru untuk melayani kebutuhan produksi mereka. Dari sini, cerita soal modernisasi mulai masuk dalam lanskap kolonialisme. Dan, seperti watak modernisasi yang diuraikan sebelumnya, mereka yang menghalangi harus dibasmi.

Kolonialisme konvensional mungkin telah berakhir. Tapi, kapitalisme selalu menemukan saluran baru untuk terus melaju. Ketika negara-negara jajahan berangsur melepaskan diri dari penjajahnya, sistem baru pun dibangun. Ekspansi modal (mungkin) tak lagi masuk lewat pintu peperangan.[5]

Pada fase ini, terutama sejak memasuki abad 20, jangkauan modernitas bermain di tataran global. Saluran utamanya adalah nation-state dan sistem ekonomi kapitalis dunia.[6] Keran-keran demokrasi pasar dibuka, pemodal besar masuk dengan sambutan ramah aparatur negara. Wajah kolonialisme menyaru dalam raut yang lebih ramah: perdagangan bebas.

Kali ini kita akan menyaksikan salah satu korban dari laju modernisasi: pasar tradisional. Ketika ritel-ritel swasta dibangun, mereka dilepaskan dalam pertarungan tak seimbang—ritel modern yang memiliki akses terhadap regulasi dan modal besar di satu sisi, melawan pasar rakyat yang merupakan gabungan modal mikro dan, karenanya, minim akses terhadap regulasi. Pertarungan tak imbang itu, oleh sebagian kalangan, disebut persaingan. Negara pun mempersilahkan persaingan tersebut, bahkan melanggengkannya.

Mulanya, pasca reformasi 1998, pemerintah menghapus pasar swasta dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Dengan demikian, tak ada lagi larangan terhadap kepemilikan asing untuk berinvestasi bisnis di minimarket atau ritel modern dengan luas kurang dari 400 m2.

Pasar swasta pun bermunculan. Dengan teknologi canggih, ruang-ruang berpendingin, dan sistem jual-beli yang modern, berbagai komoditas ditawarkan. Mulai dari daging impor, buah-buahan segar, sampai pakaian batik pun ada. Lorong-lorong becek berbau amis di pasar rakyat, sudah jadi sangat masuk akal untuk ditinggalkan.

Tentu persoalan modernitas tak sedangkal "siapa yang tersingkir" dan "siapa yang menyingkir". Kita sedang menyaksikan transisi kekuasaan. Dari rezim otoriter orde baru, kontrol terhadap segala sendi kehidupan masuk ke genggaman korporasi. Lebih dari itu, semakin lama pepesan kosong modernitas mulai dirasakan. Distribusi kesejahteraan mulai berubah arah: dari jutaan pedagang yang mengais rezeki di pasar tradisional, mengalir ke sekelompok pemodal besar yang menguasai ritel-ritel swasta. Teknologi yang menggantikan paranan manusia membuat pengangguran tumbuh subur. Kemegahan modernitas mulai berhadapan dengan kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan rupa-rupa persoalan lainnya. Maka, apa yang coba dibuktikan para pemikir seperti Heidegger, Horkheimer, dan Adorno, mulai terlihat, bahwa modernisasi bukan sekedar perjalanan yang terseok-seok, melainkan juga perjalanan ke sebuah disintegrasi total, sebuah malapetaka umat manusia.[7]

Fukuyama boleh saja berujar bahwa sejarah telah usai dan kemenangan mutlak sudah digenggam kapitalisme. Akan tetapi, perlawanan selalu bangkit dari kepala-kepala yang diinjak. Para pegiat pasar rakyat tak seperti penderita lepra yang (dianggap) bau dan kotor, lantas takberdaya saat di(ter) singkirkan. Di tengah gencetan pemodal besar dan negara yang tak memihak, mereka terus memperkuat diri. Serikat didirikan, diikuti pembenahan pola perdagangan di sana-sini. Pelayanan ditingkatkan untuk membuat pasar lebih nyaman. Mereka mendirikan aliansi pedagang pasar, agar tuntutan dapat lebih nyaring disuarakan. Koperasi pun dibentuk untuk memperkuat ketahanan modal. Segala upaya itu tak lain dari—meminjam James C. Scott—senjatanya orang-orang kalah.

Bisa jadi kisahnya tak terlalu istimewa. Cuma gerakan dari lorong-lorong sempit, becek dan berbau amis yang mulai sepi. Di benak mereka pun tak ada tujuan heroik melawan kapitalisme atau imperialisme. Hanya usaha sekuat tenaga agar dapur tetap mengepul.

Akhirnya, selamat membaca dan berdialektika!

Ilustrasi: Eka/BALAIRUNG

Catatan Akhir

(Endnotes)

1. Baca Michel Foucault [ter.] Yudi Santoso. 2002. *Kegilaan dan Peradaban*. Yogyakarta: Ikon Teralitera.
2. Baca F. Budi Hardiman. 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas*. Yogyakarta: Kanisius
3. Anthony Giddens, *The Consequenses of Modernity*. Dalam Rahadi Teguh Wiratama. *Modernitas: Antara Solusi dan Problematika*. Majalah Prisma No. 1, Tahun XXII, 1993, hlm.90
4. Penemuan itu sekaligus melahirkan takhayul modernitas, bahwa yang modern adalah yang lebih maju, lebih baik, lebih beradab.
5. Beberapa kajian dengan perspektif ekonomi-politik masih mengamini bahwa intervensi militer negara-negara barat terhadap beberapa negara di timur tengah, seperti kasus Amerika-Iraq, bermotif penguasaan sumber produksi (minyak).
6. *Op.cit.*, Rahadi
7. *Op.cit.*, Hardiman
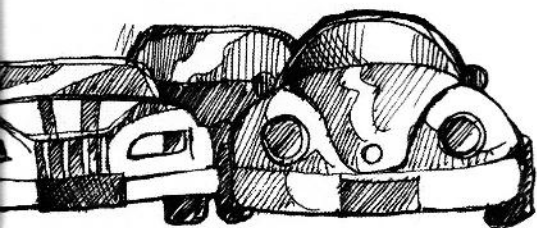
Membaca Ulang Regulasi Pasar

Pasar rakyat lesu, penegakan regulasi diperlukan.

Oleh: Mega Fitriyani, M. Ageng Yudha Pratama

"Saya malas dan malu jadi pedagang," kata Mujirah (66), pedagang sembako di Pasar Sentul, Jalan Sultan Agung, Pakualaman, Yogyakarta, pada Jumat (17/5). Ia beralasan pendapatannya berkurang drastis setelah Superindo berdiri di dekat Pasar Sentul. Bahkan, dia sampai berhutang 50 juta untuk mengembangkan dagangan dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Jelas saja, Pasar Sentul memang hanya berjarak sekitar 100 meter dari Superindo.

"Sejak ada Superindo itu, dagangan saya enggak laku. Dulu, beras 5 kwintal sehari sampai dua hari habis, sekarang dua hari paling cuma bisa habis 25 kilo," keluhnya. Walaupun demikian, Mujirah tetap bertahan di sana karena berdagang sembako adalah satu-satunya pekerjaan yang bisa ia lakukan.

Ia menambahkan, sebelum ada supermarket, Pasar Sentul bisa beroperasi sampai pukul 17.00. "Sekarang jam 10 sudah tutup," katanya. Ketika itu baru sekitar pukul 11.00 WIB, tetapi Pasar Sentul memang sudah sepi. Sebagian besar pedagang sudah menutup kios dagangannya. Hanya ada beberapa orang yang masih berbelanja sambil menawar barang-barang. Saat itu, ia sedang sibuk berkemas.

Mujirah hanya salah satu pedagang yang masih bertahan di pasar tradisional. Tempat yang sudah hampir 50 tahun menyokong hidupnya, keberadaannya mulai terancam. Untungnya, beberapa pihak yang menyadari pentingnya pasar tradisional mulai berupaya mempertahankan eksistensinya. Istianto Ari Wibowo, Koordinator Divisi Pendidikan Sekolah Pasar yang diinisiasi Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) UGM, salah satunya. Ia memulai upayanya usahanya dengan menggugat istilah pasar tradisional dan pasar modern. Ia lebih memilih penggunaan istilah pasar rakyat dan pasar swasta. "Harapannya, pasar rakyat juga bisa ikut maju dan modern. Sementara ritel modern disebut sebagai pasar swasta karena modalnya hanya dimiliki sekelompok pemodal besar," ungkapnya.

Menanggapi kemunculan pasar swasta, Puthut Indroyono, peneliti di Pustek UGM, mengatakan, kemunculan pasar swasta diawali dengan pencabutan pasar swasta dari Daftar Negatif Investasi (DNI) pasca reformasi 1998. Kebijakan tersebut melarang kepemilikan asing untuk berinvestasi bisnis di minimarket atau retail modern dengan luas kurang dari 400 m^2. Padahal, dalam buku "Mempertahankan Pilar Ekonomi Rakyat" karangan Pramono dkk.(2011), DNI menjadi pertahanan terakhir terhadap liberalisasi ekonomi di Indonesia yang telah berlangsung sejak 1967.

Pasca dikeluarkannya kebijakan tersebut, omset pasar rakyat terus menurun. Sebaliknya, omset pasar swasta di Indonesia terus meningkat. Survei AC Nielsen menunjukkan, pangsa pasar swasta meningkat dari 35% pada 2000 menjadi sebesar 53% pada 2008. Sementara omset pasar rakyat justru menurun dari sebesar 65% pada 2000 menjadi hanya sebesar 47% pada 2008. Survei tersebut juga memperlihatkan telah terjadi pertumbuhan positif sebanyak 31,4% per tahun pada pasar swasta, sementara pasar rakyat pertumbuhannya minus 8,1%.

Padahal, menurut Puthut, pasar rakyat adalah sektor yang menampung tenaga kerja terbesar kedua setelah pertanian. Di Indonesia, sekitar tujuh belas juta orang bergelut di sektor tersebut. "Kalau kondisinya terancam, kesejahteraan mereka terganggu," tutur Puthut. Selain itu, pasar rakyat juga merupakan *outlet* utama hasil pertanian. Apabila pasar hilang, petani juga akan kehilangan tempat untuk memasarkan hasil panennya.

Salah satu regulasi yang mengatur pasar rakyat dan pasar swasta adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007. Isinya terkait Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Di sana disebutkan, toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, *Departement Store*, *Hypermarket*, dan perkulakan. Sementara pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta. Tempat usahanya dapat berupa toko, kios, *los* dan tenda yang dikelola pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Di DIY, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern mencantumkan beberapa hal terkait perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat harus diatur oleh kabupaten/kota di DIY. Menurut dosen Hukum Dagang UGM, Hariyanto, S.H.,M.Kn, pengaturan seperti ini sudah tepat. Perlindungan pasar memang sebaiknya diatur oleh tiap-tiap kota/kabupaten karena mereka yang mengetahui kondisi daerah masing-masing. Sedangkan di tingkat provinsi hanya perlu hukum yang mengatur

Ilustrasi: Benyamin/BALAIRUNG

Pedagang kebutuhan pokok di pasar Sentul sedang menaiki becak menuju rumahnya. Ibu dan anak ini pulang lebih cepat karena sepinya pelanggan. Hal ini diisinyalir karena pengaruh Superindo yang menarik sebagian besar pembeli dari pasar Sentul.

Foto: Regi /BALAIRUNG

secara umum.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungandan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, jarak pasar dan toko modern diatur minimal 1500 meter. Jam buka toko modern pun dibatasi hanya dari pukul 08.00-23.00. Pengecualian hanya berlaku bagi toko yang berlokasi di jaringan jalan arteri. Batasan yang lebih tegas diberikan Kabupaten Bantul. Melalui Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pasar, toko modern yang berupa minimarket, supermarket, dan *department store* diwajibkan berjarak minimal 3000 meter dari pasar tradisional. Bahkan, bagi *hypermarket*, jarak tersebut diperpanjang menjadi 5000 meter. Sayangnya, di tiga kabupaten lain peraturan terkait pasar sama sekali tidak membahas perlindungan pasar dalam menghadapi persaingan dengan toko modern. Peraturan hanya membahas pengelolaan pasar secara internal.

Hariyanto menganalisis, regulasi yang ada sudah cukup melindungi keberadaan pasar. Dia menyebutkan di Yogyakarta sudah diatur secara jelas ruas jalan yang bisa dimanfaatkan untuk usaha minimarket, jumlah maksimal di tiap kecamatan, dan jarak minimal dengan pasar. Hanya saja penegakan regulasi di

lapangan masih bermasalah. "Coba saja dilihat di Pasar Sentul, *kan* jaraknya tidak sampai 100 meter. Padahal aturannya jelas 400 meter," kata Hariyanto. Menurutnya, hal ini bisa terjadi karena di Peraturan Walikota (Perwal) Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 masih memberi pengecualiandi pasal 7, yakni usaha minimarket waralaba yang tidak sesuai ketentuan masih bisa diberi izin setelah mendapat persetujuan dari Tim Teknis Perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. "Adanya pengecualian ini yang membuat kekuatan Perwalmenjadi lemah," jelas Hariyanto.

Selain regulasi, Puthut menambahkan, permasalahan lain adalah gagalnya Dinas Pengelolaan Pasar (Dinpas) dalam mengelola dan mengoptimalisasi fungsi pasar. Hal ini diamini Mujirah. Ia menggambarkan ketidakpedulian pengelola pasar terhadap kalahnya Pasar Sentul dibandingkan Superindo. "Ya, kata mereka, *kan* rezeki itu *nggowo dhewe-dhewe* (semua orang punya rezeki sendiri-sendiri). *Rezekine didum karo sing Kuasa* (Rezekiitu dibagi-bagi oleh Yang Maha Kuasa)," tutur Mujirah.

Puthut juga menyayangkan kondisi fisik pasar yang belum tertata dan tidak memiliki gudang. Ia menyalahkan pengelola pasar atas kondisi pasar yang semrawut, pedagang dan parkir kendaraan yang meluber. "Yang dipikirkan hanya cara memperbanyak retribusi karena ditargetkan pemerintah dari tahun ke tahun harus meningkat," tuturnya. Sementara Ir. Suyana, Kepala Dinpas Kota Yogyakarta membantah hal itu. Menurutnya, pihak Dinpas sudah menyediakan tempat sampah dan petugas kebersihan, namun kesadaran pedagang belum terbangun. Sementara untuk masalah luberan pedagang dan parkir kendaraan, Dinpas mengaku tidak bisa bertanggung jawab seorang diri. "Urusan di luar itu kewenangan Dinas Ketertiban," katanya. Suyana juga menuturkan, gudang tidak dapat dibangun karena pedagang tidak menghendakinya. "Kalau ada lahan, pedagang memilih untuk membangun *los* daripada gudang," jelas Suyana.

Puthut menambahkan modal para pedagang pasar rakyat pun kalah dibandingkan pasar swasta. Ia membagi modal menjadi tiga jenis, yakni modal material, modal intelektual, dan modal sosial. "Dari segi modal material, pemodal kecil harus berhadapan dengan pemodal besar. Istilahnya *free fight liberalism*," katanya.

Akses permodalan pelaku pasar rakyat pun masih rendah. Pramono dkk. (2011) menyebutkan di DIY pedagang pasar sebagian besar lebih mengandalkan modal sendiri (66,4%), kemudian disusul modal dari perbankan (14,8%), pola titip jual/ konsinyasi (12,1%), koperasi (4%), dan rentenir (2,7%).

Dari segi modal intelektual, Puthut memaparkan mayoritas pedagang belum memiliki inovasi dan strategi bisnis yang baik. "Mereka *kan* kalah jika dibandingkan dengan manajer ritel-ritel itu,"terangnya. Ia pun berujar, dari segi modal sosial, pasar rakyat pun telah dikalahkan. Modal sosial berbentuk seperti asosisi pedagang yang nantinya akan membantu pengembangan pedagang itu sendiri. Mayoritas pedagang belum bergabung dengan asosiasi pedagang. Selain itu, asosiasi tersebut lebih banyak berperan untuk keperluan administratif yang menyangkut kepentingan pemerintah dan sosial, namun tidak banyak berperan dalam hal advokasi. "Para pedagang asosiasi pasar memang bukan merupakan asosiasi yang kuat," kata Tarli, Nugroho, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.

Menurut Tarli, selain ketiga hal itu, perilaku konsumen juga merupakan salah satu penyebab berkurangnya kekuatan pasar rakyat. "Selama ini *kan* kita memposisikan diri sebagai *leisure class*," kata Tarli. Mereka memilih untuk berbelanja di ritel swasta yang lebih nyaman tanpa mempertimbangkan efek perilaku itu bagi lingkungan. Dia mencontohkan dua toko kelontong yang gulung tikar semenjak ritel swasta dibangun di daerah Maguwoharjo, Sleman.

Tarli yakin, apabila tidak ada pembenahan, pasar rakyat pada suatu saat akan lenyap. Pramono dkk (2011) menyebutkan jumlah ritel swasta di DIY sejak 2007-2009 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada 2007, jumlahnya masih 228, kemudian menjadi 304 dan 352 di 2008 dan 2009. Sementara itu, jumlah pasar rakyat pada tahun yang sama tidak berubah, yakni 338 buah. "Suatu saat pasar akan hilang," kata Tarli.

Sebagai upaya dalam mengatasi hal ini, Revrisond Baswir, Ketua Pustek UGM, memandang perlunya revitalisasi konsep koperasi pedagang pasar guna mendukung kemajuan pasar rakyat. Selama ini koperasi pasar masih lemah dan terkotak-kotak. "Seharusnya koperasi di pasar itu merangkul semua elemen pasar, bisa ada pedagang, konsumen, *supplier*, sampai tukang parkir. Namanya bukan koperasi pedagang pasar, tapi koperasi pasar,"katanya. Ia menambahkan, dengan konsep koperasi pasar, pedagang bisa mendapatkan harga barang yang lebih murah dari konsumen, sehingga akhirnya bisa memberikan harga jual yang murah pada konsumen. "Pasar memiliki potensi untuk bersaing," katanya.

Potensi itu ternyata belum diketahui Mujirah. Ia tersenyum kecut ketika membayangkan masa depan pasar. "Ya, enggak bisa seperti dulu. Sekarang toko di mana-mana," tuturnya sambil terus menata barang dagangan. Sementara itu, Revrisond meyakinkan bahwa pasar masih memiliki potensi saing. "Yang perlu diingat, perubahan ini harus dilakukan perlahan-lahan dan oleh elemen pasar itu sendiri. Sebab, regulasi yang ada memang mengarahkan konsep pasar menjadi seperti sekarang. Pembuat regulasi sudah disetir pemodal pasar swasta," pungkas Revrisond.